

PERFORMA PENGGUNAAN KESANTUNAN KOMUNIKASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DI DALAM MEDIA SOSIAL

Alkhadri Astya¹, Novia Juita², Ngusman³
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang, Indonesia
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, 25131. Sumatera Barat
Email: alkhadriastya@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the performance of the use of communication politeness in terms of the use of the principle of language politeness by the Governor and Vice Governor of West Sumatra in Facebook. This research is a qualitative research using descriptive method. The data in this study are writings written by the Governor and Vice Governor of West Sumatra. Data were collected in the following manner, (1) to capture the screen of the writings of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra (period 2016-2021) on Facebook account; (2) transcribes the entire Facebook post; and (3) to observe and determine data that includes the performance of Indonesian politeness. The examination of data validation in this study uses a detailed description technique. After the data collected, then analyzed with the following steps, (1) identifying and transcribing data, (2) classifying, (3) calculating, (4) interpreting data, and (5) summing up data. The conclusion of this study is the performance of Indonesian politeness in the writings in the Governor and Vice Governor of West Sumatra very well. This statement is evidenced by the corresponding speech language utterance of 519 sentences (98%) and non-corresponding nine sentences (2%). Conformity of the use of the principle of communication politeness that many found is the maxim of conclusions and incompatibility of the use of the principle of communication civility that many found is the maxim of praise and humility.

Keywords: *politeness, governor and deputy governor, facebook*

Pendahuluan

Media sosial merupakan alat untuk mempublikasikan seluruh kegiatan apapun yang diinginkan untuk memberikan informasi kepada seluruh orang. Kegiatan yang dipublikasikan di dalam media sosial sangatlah beragam. Keberagaman tersebut yang berdampak besar meluas di seluruh dunia berupa dari segi tulisan, kegiatan, maupun ucapan secara cepat, efektif, dan efisien yang dapat

¹ Mahasiswa penulis skripsi, prodi Sastra Indonesia

² Pembimbing I, dosen FBS Universitas Negeri Padang

³ Pembimbing II, dosen FBS Universitas Negeri Padang

menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *line*.

Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini adalah *facebook*. *Facebook* adalah salah satu media pembelajaran, siapa saja bisa melihat dan mendapatkan banyak informasi dari berbagai penjuru dunia melalui *facebook*. Media sosial merupakan alat yang digunakan masyarakat untuk menuliskan apa saja yang mereka pikirkan supaya dapat dibagikan dengan orang-orang yang menjadi teman mereka. Pengguna *facebok* sekarang ini tidak hanya kalangan masyarakat biasa saja, melainkan para pejabat publik di Indonesia juga menggunakan *facebook* salah satunya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Istilah *pejabat publik* berasal dari dua kata yaitu *pejabat* dan *publik*. Dalam KBBI (2008:554), *pejabat* adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Kata *publik* memiliki arti orang banyak atau umum (KBBI, 2008:1110). Selain itu, gubernur memiliki arti kepala pemerintah tingkat provinsi; kepala pemerintah tingkat I (KBBI, 2008:463). Wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *pejabat publik* adalah kepala pemerintah tingkat provinsi yang memegang jabatan penting untuk kepentingan orang banyak atau umum.

Dalam penggunaan media sosial hal yang paling sering di gunakan adalah bahasa karena bahasa merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik. Kajian mengenai kesantunan berbahasa seharusnya mencerminkan budi pekerti yang baik dari penuturnya. Kesantunan berbahasa jika dikaitkan dengan media sosial merupakan salah satu tema menarik untuk diteliti. Berbicara mengenai media sosial, hal yang pertama kali kita dapat adalah berbagai informasi dan strategi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan eksistensi dan prestasi gubernur dan wakil gubernur tersebut di mata masyarakat.

Kajian kesantunan berbahasa khususnya dalam komunikasi politik sangatlah penting untuk dilakukan. Menurut penelitian Oktavianus dan Revita (2013), sebuah tuturan berpotensi menyebabkan orang lain kehilangan muka atau dipermalukan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam memilih bentuk tuturan. Salah satu penelitian yang mengkaji kesopanan berbahasa dalam

komunikasi politik juga dilakukan oleh Yusri (2013). Penelitian yang dilakukan Yusri bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara tutur kesopanan berbahasa dalam komunikasi politik terhadap keterpilihan seorang tokoh elit politik pada calon gubernur Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian secara umum dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa seorang gubernur dan wakil gubernur memberikan pengaruh yang baik terhadap eksistensi mereka di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering pejabat publik bertutur sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa maka akan semakin tinggi pula tingkat keterpilihan pejabat publik tersebut di mata masyarakat. Maka dari itu penting dilakukannya penelitian performa penggunaan kesantunan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat di dalam media sosial.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, artikel ini akan memfokuskan tentang performa penggunaan prinsip kesantunan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di *Facebook*. Rumusan masalah yang dimaksud adalah bagaimanakah performa penggunaan prinsip kesantunan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam *Facebook*? Tujuan pembahasan artikel ini untuk mendeskripsikan performa penggunaan prinsip kesantunan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam *Facebook*. Teori yang penulis gunakan adalah teori yang bersumber dari buku Leech dengan judul Prinsip-Prinsip Pragmatik.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang ditulis oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat melalui akun *Facebook*. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan beberapa tuturan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut. (1) menangkap layar tulisan-tulisan Gubernur Sumatera Barat dengan akun facebook Irwan Prayitno, peneliti ambil dari tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 23 Juli 2017. Tulisan Wakil Gubenur Sumatera Barat dengan akun *facebook* Nasrul Abit Wagub Sumbar peneliti ambil dari tanggal 17 Juni 2017 sampai 23 Juli 2017 dan akun

facebook Nasrul Abit peneliti ambil dari tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014; (2) mentranskripsi seluruh tulisan *Facebook* tersebut; (3) mengamati dan menentukan data-data yang termasuk performa penggunaan prinsip kesantunan komunikasi. Pemeriksaan pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik uraian rinci dan tringulasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah berikut. (1) mengidentifikasi dan mentranskripsi data-data, (2) mengklasifikasikan, (3) mengalkulasikan data menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase kesalahan pada satu kajian} = \frac{\text{Jumlah kesalahan yang dianalisis}}{\text{Jumlah keseluruhan data}} \times 100\%.$$

Hasil dari data berpedoman kepada kriteria penilaian berikut ini (Abdurrahman dan Ellya, 200:264).

No	Tingkat Penguasaan (dalam %)	Kualifikasi
1	81—100%	Baik Sekali
2	66—80%	Baik
3	56—65%	Cukup
4	41—55%	Kurang
5	<40%	Sangat Kurang

(4) menginterpretasi data, dan (5) menyimpulkan data.

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan, pemahaman terhadap macam-macam kesesuaian dan ketidaksesuaian yang terdapat di dalam penggunaan prinsip kesantunan berbahasa, berikut akan diberikan penjelasannya. Dalam artikel ini, penulis menampilkan perwakilan data yang dianalisis sesuai dan ketidaksesuaian dalam penggunaan prinsip kesantunan berbahasa Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat.

Penggunaan prinsip kesantunan berbahasa dalam tindak tutur oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menurut Leech (1993:170), mengemukakan kesantunan berbahasa adalah usaha untuk membuat adanya

keyakinan-keyakinan dan pendapat yang tidak sopan menjadi sekecil mungkin dengan memenuhi prinsip kesantunan berbahasa yang terdiri atas maksim-maksim. Leech (1993:206) menjelaskan prinsip-prinsip kesantunan menjadi enam maksim. Maksim-maksim tersebut terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim kesimpatian. Berdasarkan penggunaan prinsip kesantunan berkomunikasi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah maksim pujian, maksim kesepakatan dan maksim kerendahan hati.

a. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksim Kearifan

(1) Selain itu saya juga memberikan cinderamata kepada peserta konferensi dan mengharapkan agar tidak sekali saja mereka datang ke Sumbar untuk menikmati pesona kuliner dan alamnya yang indah. (94-21)

Dapat dilihat pada contoh kalimat (1), merupakan kalimat yang sesuai prinsip kesantunan maksim kearifan. Konteks penggunaan dapat dilihat dari bukti lampiran dan gambar yang menjelaskan kegiatan Gubernur dan waki Gubernur Sumatera Barat. Maksim kearifan adalah buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Contoh kalimat (1) yang digunakan pada penyampaian kata *memberikan cinderamata* merupakan pemberian kenang-kenangan untuk mempererat rasa persaudaraan serta keuntungan bagi peserta konferensi untuk menikmati pesona kuliner dan alam Sumbar. Pada penggunaan prinsip kesantunan maksim kearifan, peneliti tidak menemukan pelanggaran yang terjadi pada tulisan-tulisan yang dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam media sosial.

b. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksim Kedermawanan

(2) Pada Kesempatan ini Bpk Wagub Sumbar memberikan bantuan Uang Sebesar 20 jt. (383-126)

Dapat dilihat pada contoh kalimat (2), merupakan kalimat yang sesuai prinsip kesantunan maksim kedermawanan. Kalimat di atas menjelaskan bahwa wakil gubernur memberikan bantuan uang sebesar 20 juta yang melihat kesantunan dan kemurahannya untuk membantu sesama. Pada penggunaan prinsip kesantunan maksim kedermawanan, peneliti tidak menemukan

pelanggaran yang terjadi pada tulisan-tulisan yang dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam media sosial.

c. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksim Pujian

- (3) Sumatera Barat dalam sejarahnya hingga kini banyak mencetak dan bersumbangsih pada hadirnya kaum *cadik pandai*, yang berprestasi bagi negeri ini. (7-2)

Dapat dilihat pada kalimat (3), merupakan kalimat yang mematuhi prinsip kesantunan maksim pujian. Contoh kalimat (3) yang digunakan pada penyampaian potongan kalimat *hadirnya kaum cadik pandai, yang berprestasi bagi negeri ini* merupakan pujian yang diberikan secara langsung oleh gubernur atas prestasi yang diperoleh. Pada penggunaan prinsip kesantunan, peneliti mendapatkan pelanggaran yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur pada maksim pujian seperti contoh kalimat (4).

- (4) Menyangkut hal ini **Wagub kemudian melontarkan sebuah kelakar sarkas** untuk gambarkan citra rumah makan Sumbar yang terbentuk di masyarakat, diceritakannya, "ada teman di Ibukota bilang, syarat jadi pegawai rumah makan Padang itu tidak bisa berhitung, hitung harga per menu puluhan ribu, nanti total yang harus dibayar jadi beda." (431-137)

Dapat dilihat pada kalimat (4), merupakan kalimat yang melanggar prinsip kesantunan maksim pujian. Konteks penggunaan dapat dilihat dari bukti lampiran dan gambar yang menjelaskan kegiatan Gubernur dan waki Gubernur Sumatera Barat. Maksim pujian adalah kecam orang lain sedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak mungkin. Contoh kalimat (4) yang digunakan pada penyampaian kata *kelakar sarkas* merupakan kecaman bagi orang banyak dan lebih cenderung negatif sehingga mengkecam orang dengan keras tanpa memuji orang lain.

d. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksim Kerendahan Hati

- (5) Tentu ikhtiar kita tidak berhenti sampai disitu, karena harapan kami agar nelayan bisa melaut dengan lancar hingga seterusnya, tidak lagi terikat dengan larangan Kementerian KKP dalam Peraturan Menteri No 71/Permen-KP/2016. (30-10)

Pada contoh kalimat (5), merupakan penggunaan prinsip kesantunan yang sesuai maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati dapat dilihat dari gejala-

gejala yang ditemukan seperti, pujilah diri sendiri sedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Penjelasan dari kalimat (5), bahwa gubernur dan seluruh staf mengkecam untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan sebagai tuntutan bagi dirinya untuk masyarakat yang ada di Sumbar. Pada penggunaan prinsip kesantunan maksim kerendahan hati peneliti mendapatkan pelanggaran yang terjadi dalam tulisan-tulisan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam media sosial seperti contoh kalimat di bawah ini.

(6) Saya **didaulat** para direksi dan komisaris Bank Muamalat Indonesia menerima nasi tumpeng pada acara puncak milad ke-25 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel The Rizt-Carlton, Mega Kuningan Jakarta pada malam ini (18-6)

Pada contoh kalimat (6), kata *didaulat* terkesan sombong dan meninggi. Konteks penggunaan dapat dilihat dari bukti lampiran dan gambar yang menjelaskan kegiatan Gubernur dan waki Gubernur Sumatera Barat. Kalimat yang digunakan pada contoh data (6) melanggar maksim kerendahan hati yang berarti memuji diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kata *didaulat* merupakan kata yang sering digunakan pada raja yang memiliki suatu kerajaan dan tentu kata tersebut tidak cocok digunakan oleh gubernur.

e. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksim Kesepakatan

(7) Kerjasama ekonomi akan menguntungkan dua belah pihak tidak hanya pengusaha dan pemerintah provinsi Sumbar, tetapi juga masyarakat setempat. (81-18)

Pada contoh kalimat (7), merupakan penggunaan prinsip kesantunan yang sesuai maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan dapat dilihat dari potongan kalimat *Kerjasama ekonomi akan menguntungkan dua belah pihak* bahwa kesepakatan yang dijalin antara diri dan lain terjadi sebanyak mungkin. Pada penggunaan prinsip kesantunan maksim kesepakatan peneliti mendapatkan pelanggaran yang terjadi dalam tulisan-tulisan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam media sosial seperti contoh kalimat di bawah ini.

(8) Wagub Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, dalam persiapan musda kwarda pramuka Sumbar 2017, bahwa diri menyesuaikan jika saya tidak akan mendahului pak gubernur, jadi sebaiknya sesuai arahan pak Gubernur saja, **mana orang yang terbaik diizinkan dan orang banyak**

menyetujui saya bersedia, akan tetapi menurut beliau dan saya tidak dalam kapasitas memutuskan.
(459-145)

Tulisan pada kalimat (8), merupakan permintaan persetujuan untuk memutuskan suatu keputusan. Konteks penggunaan dapat dilihat dari bukti lampiran dan gambar yang menjelaskan kegiatan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat. Contoh Kalimat (8) melanggar prinsip kesantunan maksimum kesepakatan karena isi dari pernyataan tersebut untuk memutuskan suatu keputusan dengan keuntungan diri sendiri agar ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin.

f. Penggunaan Prinsip Kesantunan Maksimum Kesimpatian

(9) Saya bersama rombongan sedang bersiap-siap menunggu acara Forum Bisnis di kediaman Wakil Duta Besar Indonesia di kompleks KBRI Brussel. (221-62)

Pada contoh kalimat (9), merupakan penggunaan prinsip kesantunan yang sesuai maksimum kesimpatian. Konteks penggunaan dapat dilihat dari bukti lampiran dan gambar yang menjelaskan kegiatan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat. Maksimum kesimpatian dapat dilihat dari potongan kalimat *Saya bersama rombongan sedang bersiap-siap menunggu acara Forum Bisnis di kediaman Wakil Duta Besar Indonesia* bahwa tingkat rasa simpati yang dijalin antara diri dan lain terjadi sebanyak mungkin. Pada penggunaan prinsip kesantunan maksimum kesimpatian, peneliti tidak mendapatkan pelanggaran yang terjadi dalam tulisan-tulisan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di dalam media sosial.

Pada penggunaan prinsip kesantunan dapat dikaitkan dengan hasil pembahasan peneliti mendapatkan beberapa pelanggaran dalam tulisan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Adapun pelanggarannya yaitu melanggar maksimum pujian, melanggar maksimum kesepakatan dan melanggar maksimum kerendahan hati. Pelanggaran maksimum yang tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan gubernur dan wakil gubernur yaitu maksimum kearifan, maksimum kedermawanan dan maksimum kesimpatian.

Ini terlihat dari jumlah 172 *screenshot* yang memiliki data sebanyak 528 tuturan berupa kalimat ditemukan adanya sesuai penggunaan prinsip kesantunan

519 kalimat (98%) dan melanggar sebanyak sembilan kalimat (2%) dengan rincian kesesuaian maksim kearifan sebanyak 18 kalimat dan ketidaksesuaian tidak ditemukan dalam penggunaan maksim kearifan. Kesesuaian pada maksim kedermawanan sebanyak tiga kalimat dan ketidaksesuaian tidak ditemukan dalam penggunaan maksim kedermawanan. Kesesuaian pada maksim pujian sebanyak 103 kalimat dan ketidaksesuaian maksim pujian sebanyak empat kalimat. Kesesuaian pada maksim kerendahan hati sebanyak 49 kalimat dan ketidaksesuaian maksim kerendahan hati sebanyak empat kalimat. Kesesuaian pada maksim kesepakatan sebanyak 17 kalimat dan ketidaksesuaian maksim kesepakatan sebanyak satu kalimat. Kesesuaian pada maksim kesimpatian sebanyak 329 kalimat dan ketidaksesuaian tidak ditemukan dalam penggunaan maksim kesimpatian.

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan Yusri (2013), dengan topik pelanggaran kesopanan berbahasa dalam komunikasi politik. Hasil temuan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelanggaran kesopanan berbahasa yang dilakukan adalah cenderung melanggar maksim kesederhanaan karena dalam hal ini sebagian besar tuturan cenderung bersifat memuji diri sendiri ataupun berusaha untuk menjatuhkan lawan politik. Hasil penemuan penelitian yang baru adalah pelanggaran maksim pujian, pelanggaran maksim kerendahan hati dan pelanggaran maksim kesepakatan. Kesopanan berbahasa seorang tokoh politik akan berpengaruh positif terhadap tingkat keterpilihan mereka dalam berbicara di mata masyarakat.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan persentase yang didapat dari kesesuaian dan ketidaksesuaian yang dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam akun *facebook*, dapat disimpulkan bahwa performa penggunaan prinsip kesantunan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dapat dikatakan baik sekali. Ini dibuktikan dengan kualifikasi tersebut dinilai berdasarkan rentang 1-100% dengan persentase yang benar sebanyak 98% penggunaan prinsip kesantunan berbahasa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Banyak data yang didapatkan dari 528 kalimat tuturan, ditemukan kalimat yang sesuai prinsip kesantunan berbahasa sebanyak 519 kalimat (98%), kesesuaian tersebut

terdiri dari sesuai maksim kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan kesimpatian, sedangkan ketidaksesuaian yang terdapat di dalam penggunaan prinsip kesantunan komunikasi sebanyak sembilan kalimat (2%), ketidaksesuaian tersebut terdiri dari maksim pujian, maksim kerendahan hati dan maksim kesepakatan.

Bahasa yang digunakan pejabat publik sekarang ini memperlihatkan keeksistenian dirinya untuk meningkatkan citra mereka di mata masyarakat di dalam media sosial. Dalam membuat sebuah tuturan—terutama di media sosial, *Facebook* salah satunya—Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat harus memperhatikan penggunaan prinsip kesantunan komunikasi dalam berbicara. Hal ini masih terdapat kesalahan pada tuturan kalimat yang melanggar prinsip pujian, kerendahan hati dan kesepakatan. Walaupun itu kesalahan yang kecil, tetapi akan terus bertambah jika terus dilakukan berulang-ulang. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik berdampak bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran yang terjadi dalam komunikasi tulis bisa diminimalisir dengan cara memperhatikan kesantunan isinya sebagai cerminan etika dan kesopanan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abdurahman dan Elly Ratna. 2003. *Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Padang: UNP Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Oktavianus dan Ike Revita. 2013. *Kesantunan dalam Bahasa Minangkabau*. Sumatera Barat : Minangkabau Press.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Yusri. 2015. "Pelanggaran Kesopanan Berbahasa dalam Komunikasi Politik Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013". *Jurnal Universitas Gadjah Mada* Vol. 5 No.1.